

Sharing Knowledge Best Practice Analisis Kebijakan Ekonomi Perkebunan di Indonesia

Frendy Ahmad Afandi

Kedeputan Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian RI, Jakarta, Indonesia

*email: frendystp@gmail.com

Abstrak

Analisis kebijakan merupakan jabatan fungsional yang diharapkan dapat menjembatani antara hasil-hasil penelitian menjadi kebijakan berbasis bukti. Sehingga kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Siklus kebijakan terdiri dari agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Untuk dapat melaksanakan analisis kebijakan ekonomi perkebunan dengan baik, maka diperlukan strategi dalam melakukan analisis/kajian kebijakan, strategi advokasi kebijakan, dan optimalisasi peran analisis kebijakan di instansi maupun nasional. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada analisis kebijakan di seluruh Indonesia melalui media zoom. Sharing knowledge best practice analisis kebijakan ekonomi perkebunan di Indonesia dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab kepada analisis kebijakan seluruh Indonesia melalui platform zoom. Poin-poin utama materi yang disampaikan adalah penguasaan metode analisis, pemanfaatan media sosial dalam melakukan advokasi kebijakan, dan keterampilan penulisan publikasi artikel ataupun policy brief. Evaluasi terhadap materi yang disampaikan dilakukan melalui pemberian pertanyaan melalui platform e-quizz dan diberikan hadiah kepada juara 1-3. Hasil kegiatan ini menunjukkan sosialisasi inspirasi bagi pemenang Analisis Kebijakan untuk Indonesia Award dapat menginspirasi analisis kebijakan lainnya untuk dapat berdaya saing dan produktif dalam menghasilkan publikasi ataupun tulisan.

Kata kunci: Ekonomi Perkebunan, Kebijakan Berbasis Bukti, media sosial, Sharing Knowledge

Abstract

Policy analyst is a functional position that is expected to be able to bridge research results into evidence-based policies. So that the policies taken can be scientifically justified. The policy cycle consists of agenda setting, policy formulation, policy implementation, and policy evaluation. To be able to carry out good plantation economic policy analysis, strategies are needed in conducting policy analysis/studies, policy advocacy strategies, and optimizing the role of policy analysts at agencies and nationally. This community service aims to provide inspiration to policy analysts throughout Indonesia through zoom media. Sharing best practice knowledge of plantation economic policy analysts in Indonesia is carried out using lecture, discussion and question and answer methods with policy analysts throughout Indonesia via the zoom platform. The main points of the material presented are mastery of analytical methods, use of social media in carrying out policy advocacy, and skills in writing published articles or policy briefs. Evaluation of the material presented was carried out by asking questions via the e-quizz platform and prizes were awarded to 1st-3rd place winners. The results of this activity show that the dissemination of inspiration for the winners of the Policy Analyst for Indonesia Award can inspire other policy analysts to be competitive and productive in producing publications or writings.

Keywords: plantation economics, evidence based policy, social media, sharing knowledge

Submit: Juli 2024

Diterima: Agustus 2024

Terbit: Agustus 2024

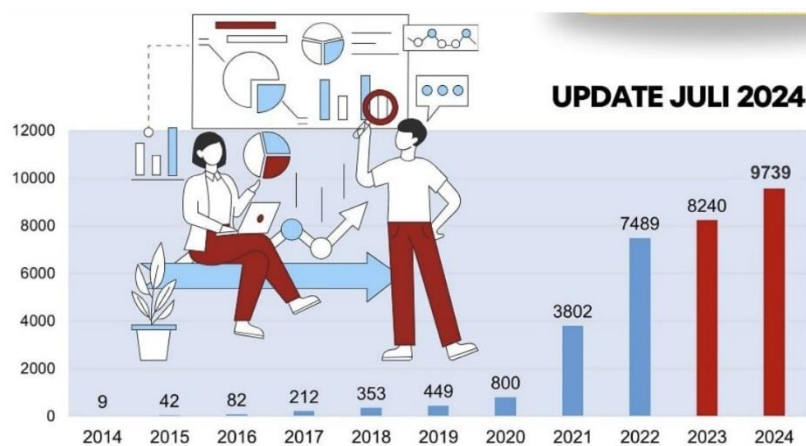


This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Pendahuluan

Analisis kebijakan merupakan fungsional yang melakukan kajian dan analisis terhadap kebijakan publik. Perannya sangat penting dalam proses pengambilan keputusan baik berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan politik. Tugas utama analisis kebijakan adalah mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasikan data terkait kebijakan. Tanggung jawabnya mencakup identifikasi masalah, menganalisis masalah, merumuskan berbagai opsi alternatif, dan mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diterapkan [1]. Analisis kebijakan berperan penting dalam memastikan kebijakan publik yang dibuat bersifat efektif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Data dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2024) menunjukkan perkembangan jumlah jabatan fungsional analisis kebijakan di Indonesia sangat signifikan peningkatannya. Tahun 2014 jumlahnya hanya 9 orang dan tahun 2020 jumlahnya menjadi 800 orang. Adanya kebijakan pemangkasan birokrasi melalui pemangkasan eselonisasi (khususnya eselon III dan IV) dari struktural menjadi fungsional menyebabkan peningkatan jabatan fungsional analisis kebijakan meningkat secara signifikan. Tahun 2021 jumlahnya menjadi 3.802 orang (adanya kebijakan in passing/ penyetaraan struktural ke fungsional dengan pemberian secara langsung tanpa melalui uji kompetensi) dan Tahun 2024 (per Juli 2024) jumlahnya mencapai 9.739 orang (Gambar 1)[2].



Gambar 1. Perkembangan jumlah jabatan fungsional analisis kebijakan di Indonesia

Banyaknya jumlah fungsional analisis kebijakan yang berasal dari penyetaraan memerlukan penjelasan singkat deskripsi terkait analisis kebijakan. Dengan kata lain, diperlukan *lesson learnt* dari analisis kebijakan yang sudah sukses untuk berbagi pengalaman agar dapat menjadi inspirasi bagi analisis kebijakan lainnya. Salah satu hal yang dilakukan adalah *knowledge sharing best practices* Analisis Kebijakan Ekonomi Perkebunan di Indonesia yang dilakukan oleh penulis. Penulis sendiri adalah Juara I Analisis Kebijakan untuk Indonesia Award Tahun 2023 [3].

Sharing knowledge dari penulis dapat menjadi inspirasi bagi analisis kebijakan lainnya mengingat penulis merupakan analisis kebijakan hasil *in passing* sejak akhir Desember 2021. Sehingga kegiatan atau pengalaman yang dibagikan oleh penulis selama tahun 2022 dan 2023 kemudian dapat menjuarai penghargaan Makarti Bhakti Nagari dari LAN pada tahun 2023 sebagai analisis kebijakan terbaik level nasional yang berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat menjadi inspirasi bagi analisis kebijakan lainnya di Indonesia.

Metode Pelaksanaan

Peserta *knowledge sharing best practice* Analisis Kebijakan Ekonomi Perkebunan di Indonesia adalah analisis kebijakan yang ada di Indonesia. *Knowledge sharing* ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi analisis kebijakan tentang pentingnya melakukan penulisan publikasi untuk dapat mempengaruhi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan. Peserta diundang melalui leaflet yang dibagikan 3 minggu sebelum acara berlangsung melalui platform media sosial whatsapp, facebook, dan instagram.

Paparan *knowledge sharing* dibagi menjadi 5 bagian penting. Pertama, strategi yang dilakukan analisis kebijakan dalam melakukan analisis/ kajian kebijakan. Kedua, strategi analisis kebijakan dalam melakukan advokasi kebijakan. Ketiga, upaya analisis kebijakan dalam optimalisasi peran analisis kebijakan di instansi dan level nasional. Keempat, menampilkan kolase kegiatan strategis yang dilakukan selama 2021-2023. Kelima, memberikan studi kasus yang dilakukan dalam peran analisis kebijakan dalam siklus kebijakan serta studi kasus sumbangan analisis kebijakan terhadap dokumen kebijakan nasional.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan *knowledge sharing* ini dilakukan secara swadaya oleh analis kebijakan dengan nama acara SEPAKAT (Sharing Pengalaman Para Analis Kebijakan Berbakat) pada tanggal 25 April 2024 melalui platform zoom. Acara diikuti sekitar 65 orang analis kebijakan dari seluruh Indonesia. Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan *mensharing* pengalaman tentang kiat-kiat agar menjadi analis kebijakan yang sukses (menjadi juara Analis Kebijakan untuk Indonesia Award). Beberapa poin yang disampaikan adalah strategi dalam melakukan analisis/ kajian kebijakan, strategi advokasi kebijakan, dan optimalisasi peran analis kebijakan di instansi maupun nasional.



Gambar 2. *Knowledge Sharing Best Practice Analis Kebijakan Ekonomi Perkebunan*

Materi *sharing knowledge* disampaikan dalam bentuk power point menarik disertai dengan beberapa foto kegiatan dan bukti-bukti dokumen kebijakan. Selain itu juga disampaikan beberapa dokumentasi terkait pelatihan-pelatihan penting yang diikuti dan kegiatan advokasi dan narasumber yang pernah dilakukan selama tahun 2021-2023.

Strategi dalam melakukan analisis/ kajian kebijakan adalah dengan 6 langkah. Pertama, membangun reputasi melalui penulisan buku bersama orang ternama atau lembaga bereputasi. Kedua, menguasai metode analisis kebijakan melalui pelatihan-pelatih lembaga ternama seperti Kompas Institute. Ketiga, mengetahui isu terkini melalui langganan digital media nasional seperti kompas dan tempo. Keempat, menangkap kebutuhan stakeholder melalui "jemput bola". Kelima, melakukan akumulasi pengetahuan melalui penyusunan *mind map* menggunakan aplikasi X-

Mind. Keenam, melakukan penyusunan analisis kebijakan melalui telaah staf, *policy brief*, *policy paper*, dan lain-lain [4].

Strategi advokasi kebijakan dilakukan melalui 6 langkah. Pertama, memperluas jaringan dengan berbagai *stakeholder* terkait. Lingkungan kerja di Kemenko Bidang Perekonomian sangat mendukung untuk memperoleh jaringan yang luas dari berbagai daerah. Selain itu, jaringan yang dapat dibangun dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Kedua, mempublikasikan *policy brief* dengan infografis yang menarik [5]. Pengambil kebijakan akan lebih mudah mencerna tulisan ringkas yang disertai infografis dibandingkan dengan yang hanya berupa tulisan-tulisan paragraf. Ketiga, penyusunan tulisan terpublikasi diusahakan berkolaborasi dengan rekan di berbagai sektor dan latar belakang [6]. Keempat, setelah tulisan terbit maka pengunggahan di media sosial diperlukan. Kelima, tulisan yang telah terbit dapat dibagikan kepada pemangku kepentingan melalui aplikasi *Whatsapp* [7]. Keenam, memenuhi undangan sebagai narasumber dari pemangku kepentingan terkait.

Optimalisasi peran analisis kebijakan di instansi dan nasional dapat dilakukan dengan 4 aktivitas. Pertama, membuat database data-data dasar sehingga berfungsi sebagai *think tank* data. Kedua, berperan sebagai agen perubahan di unit kerja. Ketiga, sebagai anggota aktif organisasi profesi. Keempat, berpartisipasi aktif pada kebijakan-kebijakan strategis nasional [8].

Peran analisis kebijakan dalam siklus kebijakan dilakukan melalui 4 tahap, yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan [9]. Kemenko Bidang Perekonomian adalah instansi pemerintah dimana dirumuskan, ditetapkan, dan dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan strategis di Bidang Ekonomi. Hal tersebut bersesuaian dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian negara dan lembaga pemerintah. Agenda setting bentuknya berupa Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan. Formulasi kebijakan bentuknya berupa penetapan kebijakan. Implementasi kebijakan bentuknya berupa pelaksanaan kebijakan. Adapun evaluasi kebijakan bentuknya berupa pengendalian pelaksanaan kebijakan di Kementerian/ Lembaga terkait [10]. Contoh Analisis Kebijakan Ekonomi Perkebunan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.



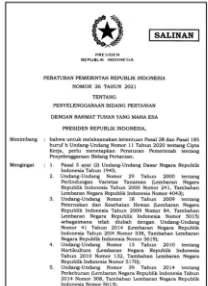


Gambar 3. Contoh siklus kebijakan ekonomi perkebunan di Indonesia

Analisis kebijakan juga dapat memberikan sumbangsih peran pada penyusunan dokumen kebijakan nasional [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Beberapa contoh dokumen kebijakan nasional pada kegiatan analisis kebijakan ekonomi perkebunan di Indonesia adalah berperan aktif dalam penyusunan peraturan turunan Undang-undang Cipta Kerja di Bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; berperan aktif dalam penyusunan naskah akademik pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Gula dan BPDP Kelapa; berperan aktif dalam penyusunan Perpres Neraca Komoditas, Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) dan RPerpres Penghimpunan dan Penggunaan Dana Kelapa Berkelanjutan.

Kolase kegiatan strategis juga perlu untuk dilakukan dokumentasi dengan baik. Kegiatan strategis dimaksud seperti menghadiri konferensi iklim tingkat tinggi dunia (Mesir 6-15 November 2022), menjadi anggota delegasi *Joint Mission to Europe* terkait *Joint Task Force* Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa, dan menghadiri *Ministrial Meeting* IMT-GT.

SUMBANGSIH DOKUMEN KEBIJAKAN NASIONAL

Tahun 2021-2023

<p style="text-align: center;">Peraturan Turunan UU CK</p>  <p style="text-align: center;">PP No. 26 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Pertanian</p> <p style="text-align: center;">PP No. 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p style="text-align: center;">Lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penugasan 2. Telaahan Staf 3. Buku Referensi Nasional 4. Bahan Pidato/Presentasi 5. Laporan Hasil Pemantauan 6. Policy Brief 7. Artikel Kebijakan <p style="text-align: center;">Perpres No. 40 Tahun 2023 Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Akademik Pembentukan BPPD Gula</p>  <p style="text-align: center;">RPerpres Penghimpunan dan Penggunaan Dana Kelapa Berkelanjutan</p>	<p style="text-align: center;">Naskah Akademik Pembentukan BPPD Kelapa</p>  <p style="text-align: center;">Perpres No. 32 Tahun 2022 Neraca Komoditas</p>
--	--	---

Gambar 4. Contoh sumbangsih analisis kebijakan pada dokumen kebijakan nasional

KOLASE KEGIATAN STRATEGIS 2022-2023

 <p style="text-align: center;">Menghadiri Konferensi Iklim Tingkat Tinggi Dunia (Mesir 6-15 November 2022) MEMAPARKAN CAPAIAN PERKEBUNAN DALAM AKSI IKLIM</p>	 <p style="text-align: center;">Join Mission to Europe (Belgia 28 Mei -1 Juni 2023) MEMPERJUANGKAN KOMODITAS PERKEBUNAN YANG TERDAMPAK EUDR</p>
 <p style="text-align: center;">Pelatihan Teknik Analisis Pasar Karet (Kuala Lumpur 15-18 Mei 2023) HASIL KERJASAMA IRC/ ITRC</p>	 <p style="text-align: center;">Menghadiri Ministerial Meeting IMT-GT (Phuket 12-17 September 2023) MENYUSUN 2nd IMPLEMENTATION BLUEPRINT IMT GT 2022-2026</p>

Gambar 5. Kolase kegiatan strategis 2021-2023

Kegiatan advokasi kebijakan dan narasumber 2021-2023 juga perlu didokumentasikan dengan baik. Kegiatan advokasi dimaksud seperti advokasi kebijakan hilirisasi pangan kepada Kementerian Investasi/ BKPM [15]. Pemenuhan panggilan sebagai narasumber juga pernah dilakukan terkait peran karet sebagai penggerak perekonomian nasional dari Kementerian Perindustrian.

KEGIATAN ADVOKASI & NARASUMBER 2022023



Gambar 6. Kegiatan advokasi dan narasumber 2021-2023

Kesimpulan

Penguasaan metode analisis, membangun reputasi, produktivitas tulisan terpublikasi, dan pengadvokasian melalui media sosial merupakan hal yang dapat menginspirasi analisis kebijakan di Indonesia. Cara-cara tersebut dapat direplikasi dan digunakan untuk membangkitkan daya saing dan produktivitas analisis kebijakan di Indonesia. Knowledge sharing pengalaman dalam memenangkan penghargaan Analisis Kebijakan untuk Indonesia Awards dapat memberikan inspirasi bagi analisis kebijakan lainnya di Indonesia. Rekam kegiatan seperti ini perlu dibagikan secara luas kepada analisis kebijakan seluruh Indonesia melalui rekaman link youtube yang sudah ada.

Daftar Pustaka

- [1] Lembaga Administrasi Negara [LAN]. Panduan optimalisasi peran jabatan fungsional analisis kebijakan. Jakarta: Pusaka LAN; 2021.
- [2] Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan LAN [Pusaka LAN]. Perkembangan jumlah jabatan fungsional analisis kebijakan di Indonesia per Juli 2024.

- Jakarta: Pusaka LAN; 2024.
https://www.instagram.com/p/C8_tXvFPk0y/?igsh=eDVtbTFkOGZzNTBy
- [3] Lembaga Administrasi Negara [LAN]. LAN undang pemenang AKUI award diseminasikan pengalaman proses pembuatan kebijakan publik. Jakarta: LAN; 2023. <https://lan.go.id/?p=15269>
- [4] Kilonzo SM, Ojebode A. Research methods for public policy. In: Aiyede ER, Muganda B. (eds) Public policy and research in Africa. Palgrave Macmillan, Cham. 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99724-3_4
- [5] Trein P, Fischer M, Maggetti M. et al. Empirical research on policy integration: a review and new directions. *Policy Sci.* 2023; 56, 29-48. <https://doi.org/10.1007/s11077-022-09489-9>
- [6] Nurron OM. Breaking the communication barrier: peran analisis kebijakan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Journal of Scientific Communication.* 2020. Okt; 2(2): 109-118
- [7] Arlinta D. Optimalkan Pemanfaatan Teknologi dalam Advokasi Pengendalian Covid-19 [Internet]. *Kompas.id.* 2022 [cited 08 Agustus 2024]. Available from: <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/02/26/optimalkan-pemanfaatan-teknologi-dalam-upaya-advokasi-pengendalian-covid-19>
- [8] Davis PK, McDonald T, Pendleton-Julian A, O'Mahony A, Osoba O. A complex-systems agenda for influencing policy studies. In: Yang Z, von Briesen E. (eds). *Proceedings of the 2019 International Conference of The Computational Social Science Society of the Americas. CSSSA 2020.* Springer Proceedings in Complexity. Springer, Cham. 2021 https://doi.org/10.1007/978-3-030-77517-9_17
- [9] Bromell D. *Policy Analysis.* New Zealand (NZ): Springer Cham. 2024. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-55364-6>
- [10] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian [Kemenko Perekonomian]. *Optimisme ekonomi nasional di tengah dinamika global: laporan kinerja 2023.* Jakarta: Kemenko Perekonomian; 2023.

- [11]Afandi FA. Analisis kebijakan pangan dan agribisnis di indonesia: kajianliteratur dan komparasi sensus pertanian (ST) 2013 dan ST 2023. *Jurnal Analis Kebijakan*. 2024 Jul 8(1): 1-17.
- [12]Afandi FA. Analisis kebijakan agribisnis gula di indonesia. *Jurnal Pangan*. 2024 Apr 33(1): 81-88.
- [13]Afandi FA, Feryanto. Penyelamatan perkaretan nasional melalui kebijakan peningkatan konsumsi karet alam domestik. *Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains Tropika*. 2024 Jan 5(4): 1-7.
- [14]Afandi FA. Analisis makroekonomi kebijakan prioritas perkebunan berdasarkan pendekatan tabel input-output. *Jurnal Analis Kebijakan*. 2023 Des 7(2): 122-135.
- [15]Afandi FA, Feryanto. Komoditas pertanian unggulan untuk hilirisasi pangan. *Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains Tropika*. 2023 Okt 5(1): 1-7.
- [16]Afandi FA, Feryanto. Sinergi kebijakan penyediaan benih unggul kopi, kelapa dan mete untuk pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor. *Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains Tropika*. 2023 Apr 5(1): 1-6.
- [17]Afandi FA. Presidensi indonesia dalam G20 untuk pembangunan ekonomi hijau dan dekarbonisasi indonesia 2060. *Jurnal Analis Kebijakan*. 2022 Jun 6(1): 86-95.